



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kesehatan di Tahun Anggaran 2022.

Selain itu laporan ini juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun mendatang. Pada Tahun 2022 untuk mendukung pembangunan kesehatan dilaksanakan beberapa program prioritas dan program lainnya yang secara sinergis dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan juga dilakukan melalui upaya peningkatan akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan peningkatan Kapasitas kelembagaan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak khususnya mengenai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Kami menyadari bahwa isi laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, 6 Februari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Dr. NI ROSMINI PANDIN, MARS**

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV C

NIP : 19690909 200112 2 001



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Kedudukan.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Ketersediaan Tenaga ASN.....	3
E. Aspek Strategis .....	5
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	16
B. Perjanjian Kinerja.....	19
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
D. Rencana Anggaran TA. 2022 .....	20
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian IKU Tahun 2022.....	23
B. Capaian Kinerja Sasaran.....	24
C. Realisasi Anggaran.....	73
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	85
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....	86
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PK Tahun 2022	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>		<b>Halaman</b>
II.	1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
	2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	18
	3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	19
	4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	19
	5 Rencana Belanja APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022.....	20
	6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2022.....	21
III.	1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
	2 Skala Nilai Pencapaian Kinerja IKU.....	23
	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	
	3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	25
	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1	
	4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	25
	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	
	5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka.....	26
	Menengahkan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 1	
	6 Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	27
	7 Persentase Temuan Material Tahun 2020-2022.....	29
	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	
	8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran 1.....	32
	9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	41
	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 28	
	10 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	42
	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	
	11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	43
	dan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 2	
	12 Angka Kematian Ibu di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	45
	13 Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	49
	14 Situasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021.....	77
IV.	1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	85





## DAFTAR GRAFIK

<b>GRAFIK</b>	<b>Halaman</b>
III. 1 Tingkat Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tahun 2022.....	24
2 Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	44
3 Kematian Neonatal di Kabupaten/Kota..... Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	46
4. Kematian Post Neonatal di Kabupaten/Kota..... Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	47
5. Kematian Bayi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	48
6. Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	50
7. Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan Fungsi Struktural Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➤ **Kepala Dinas Kesehatan**

**a. Tugas Pokok**

”Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah”

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- c. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) :
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa
  - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M)
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK):
  - a. Seksi Alat Kesehatan
  - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - c. Sub Koordinator Kefarmasian
- 7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan:
  - a. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
  - b. UPT Rumah Sakit Sayang Rakyat
  - c. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi
  - d. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah
  - e. UPT Rumah Sakit Gigi dan Mulut
  - f. UPT Pelatihan Kesehatan
  - g. UPT Unit Transfusi Darah (UTD)
  - h. UPK Pelayanan Kesehatan
  - i. UPK Kulit, Kelamin dan Kosmetika

#### **D. KETERSEDIAAN TENAGA ASN**

Jumlah tenaga yang tersedia di Dinas Kesehatan dan UPT, sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan
  - Jumlah total ASN : 258 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 17 orang
  - Sub Koordinator : 3 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 94 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 144 orang



- b. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
  - Jumlah total ASN : 417 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 8 orang
  - Sub Koordinator : 12 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 367 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 23 orang
- c. UPT Rumah Sakit Sayang Rakyat
  - Jumlah total ASN : 249 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 14 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 199 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 36 orang
- d. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi
  - Jumlah total ASN : 216 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 5 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 170 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 41 orang
- e. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah
  - Jumlah total ASN : 160 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 117 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 39 orang
- f. UPT Rumah Sakit Gigi dan Mulut
  - Jumlah total ASN : 91 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 3 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 75 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 13 orang
- g. UPT Pelatihan Kesehatan
  - Jumlah total ASN : 58 orang
  - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
  - Jumlah tenaga Fungsional : 34 orang
  - Jumlah tenaga Pelaksana : 20 orang

h. UPT Unit Transfusi Darah (UTD)

- Jumlah total ASN : 39 orang
- Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
- Jumlah tenaga Fungsional : 17 orang
- Jumlah tenaga Pelaksana : 13 orang

i. UPK Pelayanan Kesehatan

- Jumlah total ASN : 52 orang
- Jumlah tenaga Struktural : - orang
- Jumlah tenaga Fungsional : 47 orang
- Jumlah tenaga Pelaksana : 5 orang

j. UPK Kulit, Kelamin dan Kosmetika

- Jumlah total ASN : 42 orang
- Jumlah tenaga Struktural : - orang
- Jumlah tenaga Fungsional : 36 orang
- Jumlah tenaga Pelaksana : 6 orang

## E. ASPEK STRATEGIS

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal khususnya di Sulawesi Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur meningkatnya capaian kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan adalah dengan meningkatnya Indeks Kesehatan. Pencapaian Indeks Kesehatan dalam beberapa Tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penilaian Indeks Kesehatan merupakan representatif dari Indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya UHH di suatu wilayah otomatis juga memberikan nilai ungkit terhadap indeks kesehatan di wilayah tersebut. Data BPS terakhir memperlihatkan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka 78,42 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 (77,94) dan telah melebihi dari angka yang ditargetkan (77,70) atau persentase capaian sebesar 100,38%. Sedangkan Pencapaian Umur Harapan Hidup

(UHH) di Sulawesi Selatan Tahun 2022 mencapai angka 70,97 Tahun dan telah mencapai target yang ditetapkan (70,60 Tahun) dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi dua Tahun sebelumnya yaitu 70,66 Tahun pada Tahun 2021 dan 70,57 Tahun pada Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan beberapa program prioritas dan didukung program lainnya yang secara sinergis dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan juga dilakukan melalui upaya peningkatan akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Program Prioritas yang dilaksanakan di Tahun 2022, antara lain pelaksanaan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Lamappapening di Kabupaten Bone. Pembangunan Rumah Sakit Regional Bone ini bersifat tahun jamak yang dimulai dari Tahun 2021 dan ditargetkan akan beroperasi di Tahun 2023. Lokasi Pembangunan terletak di Desa Bakunge, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Progress* pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Bone yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 adalah pekerjaan konstruksi dengan posisi sampai dengan Bulan Desember sebesar 40,12%. Pembangunan Rumah Sakit ini didukung dengan penyediaan Sumber Daya Kesehatan baik pengadaan alat kesehatan yang memadai dan bermutu, penempatan tenaga kesehatan berkompeten dan Alokasi Pembiayaan pengelolaan Rumah Sakit tersebut. Rumah Sakit Regional Lamappapening yang terbangun nanti diharapkan dapat menjadi pusat rujukan dari pelayanan primer di wilayah sekitarnya, terutama kasus kegawatdaruratan yang membutuhkan akses cepat dengan penanganan/pertolongan yang tepat sehingga masyarakat di wilayah terisolasi/terpencil dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terbaik, termasuk akses rujukan lintas batas kabupaten.

Dalam rangka penurunan prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, Program prioritas yang juga dilaksanakan di Tahun 2022 adalah Aksi Stop Stunting yang sebelumnya disebut GAMMARA'NA (Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting) sebagai sebuah Inovasi di sektor kesehatan keluarga yang dilaksanakan untuk menekan jumlah kasus balita stunting, kasus kematian ibu dan bayi di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini terintegrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor

lainnya melalui Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat khususnya keluarga dengan sasaran 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Pada Tahun 2022 pelaksanaan Aksi Stop Stunting hadir dengan Jangkauan Desa Lokus yang lebih luas yaitu 10 desa lokus tertinggi prevalensi stunting di 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan total 240 desa lokus stunting. Kegiatan Aksi Stop Stunting meliputi penempatan tenaga pendamping gizi dan Pemberian Paket intervensi gizi di desa lokus stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Selain fokus pada intervensi spesifik, Tenaga Pendamping gizi desa juga diharapkan fokus pada upaya keberlanjutan program penurunan stunting di desa melalui pemberian wawasan mengenai pencegahan stunting antara tenaga pendamping gizi desa dengan tokoh masyarakat, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), organisasi kemasyarakatan, lintas sektor dan program di desa.

Program Prioritas selanjutnya adalah Sulawesi Selatan Bersinar Gencarkan (Sulawesi Selatan Bersih Narkoba, Gerakan Cari Mantu Bebas Narkoba). Program ini merupakan inovasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba berbasis keluarga dengan memberikan pemeriksaan dini (*Screening*) Narkoba secara gratis bagi pasangan yang akan menikah. Pencegahan kejahatan narkoba sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga dalam hal ini anggota keluarga yang akan melaksanakan pernikahan merupakan langkah yang tepat, karena jika salah satu calon pengantin (*catin*) merupakan orang yang menyalahgunakan narkoba maka dapat dipastikan biduk rumah tangga yang akan dibangun tidak akan sampai pada konsep keluarga bahagia dan sejahtera.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan urine bagi calon pengantin di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka telah dibuat sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk menyelamatkan anak bangsa khususnya di Sulawesi Selatan dari cengkraman penyalahgunaan Narkoba, Prikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Program SULSEL BERSINAR, GENCARKAN diharapkan akan diterima dan berjalan dengan baik di

tengah masyarakat, karena prinsip dari hasil *screening* yang akan dilakukan tidak menghalangi/membatalkan niat masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan

Pasangan yang akan menikah akan diberikan surat pengantar dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan *screening* di Puskesmas. *Screening* dilaksanakan dengan metode ASSIST (*Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test*) yang merupakan pemeriksaan awal mencakup semua zat psikoaktif dirancang khusus untuk dapat digunakan oleh petugas kesehatan dalam lingkup pelayanan kesehatan termasuk di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Selanjutnya bagi peserta dengan hasil tes positif, akan dilanjutkan dengan memberi rekomendasi untuk melaksanakan rehabilitasi melalui BNNP Sulawesi Selatan. Dari data hingga 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 2.942 orang calon (calon pengantin) yang telah melakukan *screening*. Dari jumlah ini, sebanyak 2.904 orang dengan hasil pemeriksaan urine negatif dan sisanya sebanyak 37 orang dengan hasil positif.

Di bidang Pelayanan Kesehatan, penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dengan mempertimbangkan akses kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas sebagai sarana upaya pelayanan kesehatan primer dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 jumlah Puskesmas di Sulawesi Selatan sebanyak 471 unit, yang terdiri dari 321 Puskesmas Perawatan dan 150 Non Perawatan. Keberadaan Puskesmas tersebut didukung oleh Puskesmas Pembantu sebanyak 1.400 unit dan klinik fasilitas kesehatan terintegrasi sebanyak 416 unit yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) di Sulawesi Selatan difungsikan sebagai *gate-keeper* dalam pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas dilakukan dengan mekanisme Registrasi dan Akreditasi. Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala minimal lima Tahun sekali, sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat

Praktik Mandiri Dokter Gigi. Survey akreditasi Puskesmas yang sebelumnya 3 Tahun sekali menjadi sekali 5 Tahun sekali. Tujuan Registrasi Puskesmas selain mendapatkan legalitas operasional pelayanan juga sebagai persyaratan dalam proses akreditasi. Pada Tahun 2022 semua Puskesmas (471 unit) di Sulawesi Selatan telah mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya pemberlakuan akreditasi Puskesmas adalah untuk membina Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya untuk berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Data sampai dengan akhir Tahun 2022 sebanyak 454 Puskesmas telah terakreditasi dan sebanyak 17 Puskesmas belum terakreditasi (berproses). Dari 454 Puskesmas telah terakreditasi sebanyak 78 Puskesmas telah terakreditasi Dasar, 238 Puskesmas terakreditasi Madya, 117 Puskesmas terakreditasi Utama dan 21 Puskesmas terakreditasi Paripurna. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tingkat layanan primer dilaksanakan kegiatan Puskesmas Keliling yang berlokasi di Posyandu dengan tujuan untuk memantau status perkembangan balita dan Ibu hamil serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok usia lainnya yang tidak dapat mengakses pelayanan ke Puskesmas. Jumlah Posyandu yang tercatat sampai dengan tahun 2022 sebanyak 10.263 unit.

Kegiatan sinergitas lainnya di tingkat layanan primer yang dilakukan adalah PIS-PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga). PIS-PK adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang terdiri atas 12 indikator, dengan 4 indikator prioritas yaitu : Penurunan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi balita pendek (stunting), Penanggulangan penyakit menular dan Penanggulangan penyakit tidak menular. Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan gambaran keluarga sehat, nilai IKS ini juga bias sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijakan dan intervensi yang diambil untuk menindaklanjuti permasalahan kesehatan yang dihadapi. Tahun 2022 *progress* pelaksanaan kegiatan PIS-PK pada tahap analisis data PIS-PK terintegrasi.



Di tingkat pelayanan kesehatan Rujukan, Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan dari sisi kualitas baik mutu pelayanan dan pengelolaan, penyesuaian kebijakan serta kuantitasnya. Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 120 unit terdiri dari 60 unit milik pemerintah dan 60 unit milik Swasta. Rumah Sakit milik pemerintah terdiri atas Rumah Sakit milik TNI/POLRI sebanyak 8 unit, milik Kementerian Kesehatan sebanyak 3 unit, milik Kementerian lain sebanyak 3 unit, milik Pemerintah kabupaten sebanyak 33 unit, milik Pemerintah Kota sebanyak 5 unit, milik Pemerintah Provinsi sebanyak 8 unit termasuk Rumah Sakit Lapangan Kota Makassar (pemanfaatan Asrama haji pada pandemi Covid-19 Tahun 2021). Pada Tahun 2022 juga telah direalisasikan pembangunan Rumah Sakit Regional Lamappapening di Kabupaten Bone seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya di atas.

Dalam rangka mempercepat akses kemudahan pasien untuk mendapatkan layanan rujukan yang terencana, terpadu, cepat dan berkesinambungan, karena terkait dengan penanganan awal pasien secara cepat, tepat dan akurat maka Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mencoba beberapa terobosan dalam dengan membuat sistem rujukan digital yang diberi nama SISRUTE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi). Sistem rujukan digital ini berbasis teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ketingkatlayanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Jenis-jenis rujukan yang dapat dilakukan melalui SISRUTE antara lain Rujukan IGD/Rawat Inap, Rujukan Rawat Jalan, Rujukan PSC 119, Program Rujukan Balik, Rujukan Suspek Covid 19, Rujukan Maternal, Rujukan Neonatal dan Telekonsultasi.

Sistem rujukan *online* di atas juga merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan berbagai keluhan masyarakat mengenai panjangnya antrian pasien rawat jalan di rumah sakit serta kesulitan mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan medis yang menjadi sorotan berbagai pihak. Diharapkan masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dapat terlayani oleh rumah sakit yang sudah siap sebelumnya karena sudah diatur melalui SISRUTE. Pada Tahun 2022 jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melakukan aktivasi

akun sistrute sebanyak 648 fasilitas dengan tingkat pemanfaatan di rumah sakit sebesar 80%.

Seperti halnya di tingkat layanan primer, kewajiban kepemilikan perijinan dan akreditasi di layanan rujukan juga merupakan kewajiban bagi setiap rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, telah dilakukan pemberian rekomendasi perpanjangan, penerbitan izin baru dan penurunan kelas rumah sakit selama Tahun 2022. Dari 120 rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 27 rumah sakit yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi memberikan rekomendasi izin berusaha Rumah Sakit, selebihnya sebagai pendamping sesuai regulasi yang ada. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Prov. Sulsel telah memberikan kepada 2 Rumah Sakit untuk penerbitan izin berusaha, 2 Rumah Sakit untuk izin perpanjangan izin berusaha dan kepada 2 Rumah Sakit untuk penurunan kelas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Akreditasi diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) Tahun. Akreditasi dilakukan oleh rumah sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Sampai saat ini sebanyak 93 Rumah Sakit telah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna sebanyak 32 Rumah Sakit (34%) akreditasi utama sebanyak 19 Rumah Sakit (20%), akreditasi madya sebanyak 14 Rumah Sakit (15%), akreditasi dasar sebanyak 7 Rumah Sakit (8%) dan akreditasi perdana sebanyak 21 Rumah Sakit (23,83%).

Dalam rangka pengembangan layanan prioritas di Rumah Sakit Pemerintah milik Provinsi, pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan membuat kesepakatan bersama untuk akses layanan rujukan melalui program jejaring pengampunan layanan prioritas antara lain dengan :

- Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian di Bidang Kanker

- Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian Bidang Stroke.
- Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Tuberkulosis
- Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular
- Rumah Sakit Umum (RSU) Pusat National Dr. Cipto mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian di Bidang Urologi
- Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Jejaring Pengampuan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).

Faktor pendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu adalah ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan gambaran kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah memiliki Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan seutuhnya baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Analisa data yang diambil dari ASPAK dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar, izin operasional dan penetapan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, penilaian akreditasi serta pengembangan pelayanan di Tahun berikutnya. Capaian kinerja di Tahun 2022 memperlihatkan Persentase layanan Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana di Puskesmas dalam kondisi baik sebesar 94,02% dan Persentase layanan Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik sebesar 93,02%.

Pengalokasian Anggaran di sektor kesehatan juga merupakan tombak dalam Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program antara lain penerapan paradigma sehat, pelaksanaan desentralisasi, mengatasi berbagai kedaruratan, peningkatan

profesionalisme tenaga kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS melalui upaya pengintegrasian Kesehatan Gratis ke JKN. Pembiayaan Pembangunan Kesehatan harus memegang prinsip kendali mutu kendali biaya sehingga dengan anggaran yang memadai diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pengeloan program integrasi Kesehatan Gratis ke JKN melalui mekanisme pembayaran klaim yang dikelola oleh badan pengelola program JKN dalam hal ini BPJS Kesehatan. Program ini merupakan perimbangan (*sharing*) pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pesertanya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam program ini dan telah ditetapkan dengan surat Keputusan masing-masing Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp. 450.660.000.000,- untuk pelaksanaan program JKN dengan sharing dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 137.177.008.500,- dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 313.482.991.500,- dengan jumlah peserta sesuai dengan usulan SK Bupati/Walikota sebanyak 864.000 Jiwa untuk bulan Januari s/d September dan 1.700.000 Jiwa untuk Bulan Oktober s/d Desember. Realisasi dana sebesar Rp. 426.347.915.000,- dengan rincian realisasi anggaran Provinsi sebesar Rp. 129.110.476.250,- dan realisasi dana anggaran kabupaten/kota sebesar Rp. 297.237.438.750,-

Dari segi ketenagaan, hingga Tahun 2022 pemenuhan rasio tenaga kesehatan di Sulawesi selatan mencapai 23,97/100.000 penduduk, artinya dalam 100.000 penduduk dilayani oleh 23 hingga 24 orang tenaga kesehatan. Selanjutnya masing-masing rasio ketenagaan sebagai berikut : rasio Dokter Umum sebesar 24,8/100.000 penduduk, rasio dokter spesialis 32,6/100.000 penduduk, rasio dokter gigi 9,8/100.000 penduduk, rasio perawat 137,6/100.000 penduduk, rasio bidan 70,6/100.000 penduduk, rasio ahli gizi 12,34/100.000 penduduk, rasio ahli sanitasi 10,17/100.000 penduduk, rasio apoteker 15,12/100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan masyarakat 22,04/100.000 penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib terpenuhi sebagai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Adapun 9 jenis tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Analis Tenaga Laboratorium Medik (ATLM), Apoteker, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Gizi. Masing-masing tenaga kesehatan ini memiliki standar tersendiri sesuai dengan kriteria Puskesmas (Perkotaan/Pedesaan, Terpencil/Sangat Terpencil). Dari total 474 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sebesar 384 Puskesmas atau sebesar 80,8% dan masih terdapat 91 Puskesmas atau 19,19% yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2022 dalam rangka pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan antara lain Workshop bagi penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, Sosialisasi perundang-undangan terkait manajemen SDM Kesehatan dan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan sebagai motivasi bagi tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Kegiatan-kegiatan tersebut juga didukung dengan pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan kesehatan khususnya di Sulawesi Selatan, antara lain Program beasiswa Tugas Belajar yang dibiayai oleh Kemenkes Tahun 2022 sebanyak 44 orang dengan rincian DIV/DIV Profesi/Profesi sebanyak 30 orang, S1 Profesi sebanyak 2 orang, dan S2 sebanyak 12 orang. Selain itu Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) sebanyak 114 orang yang sementara Pendidikan dengan rincian PPDGS sebanyak 26 orang dan PPDS sebanyak 88 orang.

Untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tenaga kesehatan fungsional kesehatan sesuai dengan kompetensinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Tercatat sebanyak 30 Rumpun Jabatan Fungsional yang ada di Sulawesi Selatan dimana sebanyak 21 Rumpun Jabatan Fungsional telah memiliki izin penyelenggaraan uji kompetensi dengan total peserta 6.830 orang dari 8 Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung terlaksananya Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (PADINAKES) yang merupakan salah satu program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada Tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data yang bersumber dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Makassar, untuk mahasiswa yang mendapatkan program ini berasal dari 19 Kab/Kota di Sulawesi Selatan yang akan didayagunakan pada Tahun Lulus 2022 sebanyak 17 orang, Tahun Lulus 2023 sebanyak 27 orang dan Tahun Lulus 2024 sebanyak 12 orang.

Berbagai aspek strategis yang dijabarkan di atas diharapkan dapat menciptakan masyarakat Sulawesi Selatan yang mandiri dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan melainkan multi sektoral termasuk individu dan keluarga.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,  
Inklusif dan Berkarakter”**

Bila melihat rumusan visi di atas, di sektor pembangunan kesehatan dapat diterjemahkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 berupaya untuk mewujudkan kondisi Pemerintahan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mewujudkan kondisi visi tersebut, dirumuskan 5 misi pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

**🚩 Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

**Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**TUJUAN**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun adalah, sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

MISI 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1

**TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INDIKATOR	TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Persentase Area Perubahan ( <i>Reform</i> ) Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Persen (%)	-	100%
Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tahun	70,43	70,80

## **SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Tabel II.2  
**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	77,24	81
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	4	0
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/ KH)	94	90
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	6	4
	Prevalensi Balita Stunting	Persen (%)	30,59	18,59

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ditetapkan 2 Sasaran yang memuat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

Tabel II.3  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	80
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	1
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/KH)	91
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/KH)	5
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	21,59

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH Tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan; BPS (Badan Pusat Statistik)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/KH)	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 100.000	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Kabupaten/ Kota)
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	Jumlah kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 1000	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Kabupaten/ Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan; Riskekdas; PSG.

#### D. RENCANA ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Parsial 1 Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 221.030.909.677,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal Secara rinci rencana anggaran Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5  
**RENCANA BELANJA APBD  
 DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2022**

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	112.872.539.872,-	51,07
2	Belanja Modal	108.158.369.805,-	48,93
<b>JUMLAH</b>		<b>221.030.909.677,-,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6  
**ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2022**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN(Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	71.573.794.944,-	32,38%
	Persentase Temuan Material		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	149.457.114.733,-	67,62%
	Angka Kematian Bayi		
	Prevalensi Balita Stunting		
<b>TOTAL</b>		<b>221.030.909.677,-</b>	<b>100%</b>



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Selama Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui berbagai kegiatan pendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan daerah, Pemberian Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel III.1  
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91% ≤	Sangat Tinggi	ST
2.	76% < 90%	Tinggi	T
3.	66% < 75%	Sedang	S
4.	51% < 65%	Rendah	R
5.	< 50%	Sangat Rendah	SR

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana **)}} \times 100\%$
--

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

Hasil pengukuran Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan per indikator kinerja pada Tahun 2022 berdasarkan pemberian skala nilai peringkat kinerja di atas, sebagai berikut:

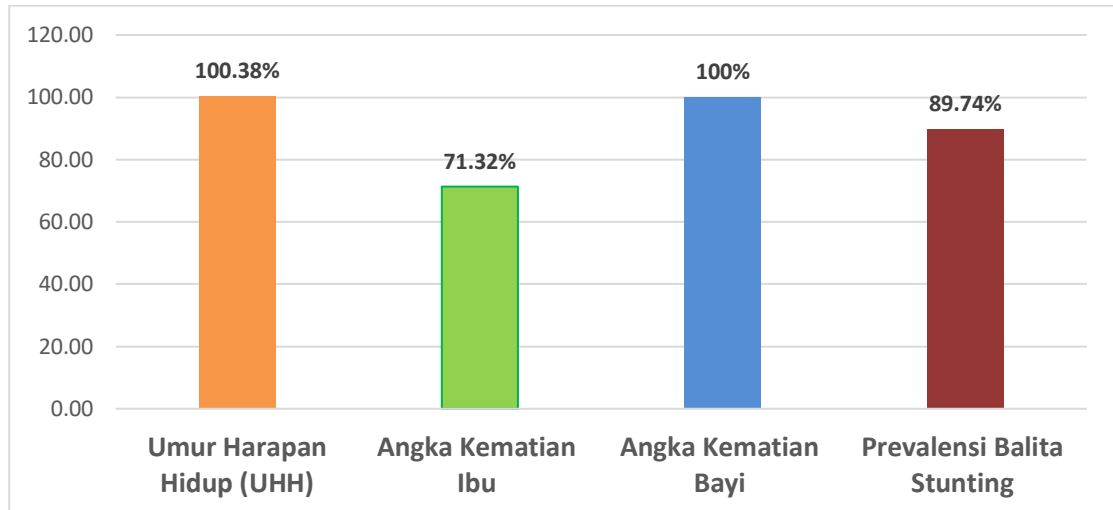
Tabel III.1  
SKALA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN IKU	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,97 tahun	100,38%	Sangat Tinggi	ST
	Angka Kematian Ibu	119/100.000 Kelahiran Hidup	76,47%	Sedang	S
	Angka Kematian Bayi	8/1.000 Kelahiran Hidup	62,50%	Rendah	R
	Prevalensi Balita Stunting	79,38%	79,38%	Tinggi	T
<b>RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU</b>			<b>79,68%</b>	<b>Tinggi</b>	<b>T</b>

Rata-rata Nilai pencapaian kinerja IKU Tahun 2022 sebesar 79,68% (tinggi) dengan 1 indikator menunjukkan capaian Sangat Tinggi (ST), 1 (satu) indikator menunjukkan capaian Tinggi (T), 1 (satu) indikator menunjukkan capaian Sedang dan 1 (satu) indikator pada predikat kinerja Rendah (R).

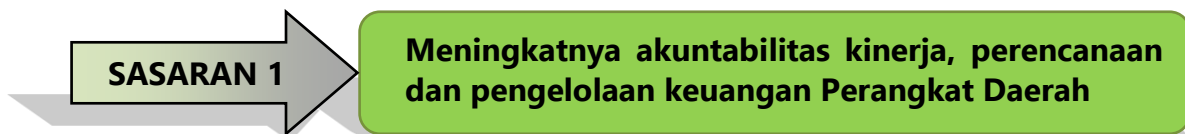
Pencapaian kinerja IKU Tahun 2022 bila digambarkan dalam sajian grafik akan terlihat seperti berikut ini:

Grafik III.1  
**TINGKAT CAPAIAN IKU**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



## B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2 (dua) sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja masing-masing memiliki beberapa indikator kinerja. Hasil Pengukuran masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :



Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "*Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif*", dan tujuan "*Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah*".

Dalam pelaksanaannya Sasaran ini didukung dengan strategi meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya aparatur dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.3  
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Nilai SAKIP OPD	80	82,00	102,50%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Persentase Temuan Material	1%	0,001%	>100%	Sangat Tinggi (ST)
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				101,25%	Sangat Tinggi (ST)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas menunjukkan rata-rata realisasi capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah” telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **101,25%** dengan kriteria *Sangat Tinggi*

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11I.4  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP OPD	82,86	82,00%	82,00
2.	Persentase Temuan Material	0,26%	0,02%	0,001%

Hasil Pengukuran kinerja indikator di Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya menunjukkan terjadi kenaikan capaian kinerja pada indikator Persentase Temuan Material dan terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP OPD. Nilai SAKIP yang tertera pada tabel capaian masih menggunakan nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.**

Tabel 111.5  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN  
 TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Nilai SAKIP OPD	82,00	81%	-
2.	Persentase Temuan Material	0,001%	0%	-

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai bahkan melebihi target jangka menengah yaitu indikator Nilai SAKIP OPD dan terdapat 1 (satu) indikator yang menghampiri target yaitu Persentase Temuan Material, diharapkan untuk Tahun berikutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perolehan hasil evaluasi 82,00 atau kategori “A” (**Memuaskan**), yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6  
NILAI EVALUASI SAKIP TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI TAHUN 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Internal	25	20,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>82,00</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Penilaian SAKIP di Tahun 2021 di atas menggunakan kriteria penilaian baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Evaluasi ini diharapkan instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah dapat meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam Renstra masing-masing OPD.

Hasil penilaian SAKIP, diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Pada Laporan Kinerja tidak secara spesifik menguraikan pengelolaan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan pada tingkat pelayanan primer yaitu Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit.
2. Pengukuran kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Internal secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi belum menggunakan bantuan teknologi (aplikasi) sehingga capaian atau progress kinerja belum dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

**Beberapa Rekomendasi yang diberikan dari hasil Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, antara lain :**

1. Menguraikan secara spesifik pada Laporan Kinerja mengenai pengelolaan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan pada tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. Mengembangkan teknologi informasi (aplikasi) yang digunakan di internal Dinas Kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat pengisian serta pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari level staf sampai kepada pimpinan tertinggi maupun untuk kegiatan evaluasi akuntabilitas internal Dinas Kesehatan.

Selanjutnya tindak lanjut yang telah dilaksanakan di Tahun 2021 sekaitan dengan rekomendasi di atas, sebagai berikut :

1. Menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dimana diuraikan pada Bab. I Pendahuluan point D (Aspek Strategis)
2. Penganggaran difokuskan untuk pelaksanaan program prioritas dan penyediaan peralatan kantor pasca musibah kebakaran kantor, sehingga pelaporan data kinerja dipercepat dengan memanfaatkan fasilitas media sosial yang ada. Selain itu pelaporan kinerja berjenjang dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi yang ada yaitu e-kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dan e-kinerja BKN.

## 2. Persentase Temuan Material

Indikator kinerja ini untuk mengukur persentase jumlah temuan penyimpangan keuangan yang material sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Tim APIP (Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan). Persentase temuan material Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, maksudnya jumlah temuan keuangan masih sangat kecil dan diharapkan hingga periode Renstra berakhir nanti mencapai angka 0%, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.7  
**PERSENTASE TEMUAN MATERIAL TAHUN 2020-2022  
 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH TEMUAN MATERIAL (Rp)	%
2020	141.063.356.004,30,-	361.978.366,-	0,26%
2021	104.526.906.078,-	18.325.000,-	0,02%
2022	221.030.909.677,-	3.072.000,-	0,001%



Pada Tahun 2022, jumlah temuan material telah mengalami penurunan dari jumlah Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pengawasan internal dalam pelaksanaan program/kegiatan telah maksimal dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan baik dari sisi administrasi maupun peruntukkan pengelolaan penganggaran.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :**

- 1) Adanya regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan program pembangunan kesehatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- 2) Rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil Bimbingan Teknis oleh Kemenpan RB dan Biro Organisasi dalam pelaksanaan SAKIP, evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja.
- 3) Adanya *Cascading* dan Pohon Kinerja yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian kinerja.
- 4) Berjalannya penatausahaan keuangan dan verifikator administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) dalam melakukan verifikasi sebelum disetujui pengguna anggaran untuk dibayarkan.
- 5) Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi rutin setiap triwulan dari Tim Inspektorat Provinsi dan Rekomendasi hasil Audit BPK di Tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan Asset milik daerah, sebagai faktor koreksi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meminimalisir terjadinya temuan material.

**Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :**

- 1) Komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi masih kurang di tingkat internal OPD sehingga pelaksanaan SAKIP/RB dirasakan hanya karena merupakan pemenuhan kebutuhan penilaian dan tidak menjadi budaya dalam OPD.
- 2) Kurangnya pemahaman dan koordinasi pelaksana kegiatan pada proses pengadaan barang dan jasa serta peraturan pertanggungjawaban kegiatan termasuk keterlambatan penyampaian administrasi kelengkapan pertanggungjawaban sehingga memperlambat pelaksanaan proses penyelesaian administrasi keuangan selanjutnya.

**Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:**

- 1) Integritas dan penegasan komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP/RB sehingga pencapaian kinerja lebih optimal.
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendasari administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkup internal OPD.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp 71.573.794.944,- dengan realisasi sebesar Rp 67.158.293.722,- atau 93,83%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,25%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 7,9%. Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 97,76% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 93,83%, maka terdapat efisiensi sebesar 4,19%.

Pada tahun 2022 terdapat anggaran yang mendukung sasaran ini namun belum terealisasi yaitu sebesar Rp 2.498.389.764,- sehingga total anggaran yang digunakan untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp 69.656.683.486,-.

Tabel III.8  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	71.285.390.644,-	66.958.459.530,-	93,93%	95,52%	1,69%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	288.404.300,-	199.834.192,-	69,29%	100%	44,32%
	<b>JUMLAH</b>	<b>71.573.794.944,-</b>	<b>67.158.293.722,-</b>	<b>93,83%</b>	<b>97,76%</b>	<b>4,19%</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah didukung sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi**

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp 71.285.390.644,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 66.993.394.230,- atau 93,98% dan realisasi fisik 95,92%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 2.426.389.764,-

Hasil pencapaian indikator kinerja program, antara lain :

- Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,6%.
- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP dengan target sebesar 1% dan realisasi 0,001%.

- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 97,73%.

**Kegiatan yang mendukung terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi, sebagai berikut :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Capaian Kegiatan persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 499.435.080,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 404.469.610,- atau 80,99%, dan realisasi fisik 100%, Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.976.970,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dengan Target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 107.841.176,- dengan realisasi keuangan Rp 82.469.886,- atau 76,47% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 395.394,-
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 102.553.352,- dengan realisasi keuangan Rp 86.883.652,- atau 76,47% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 790.788,-
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 11.774.500,- dengan realisasi keuangan Rp 9.453.00,- atau 80,28% dan realisasi fisik 100%.

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator kinerja Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 11.099.500,- dengan realisasi keuangan Rp 10.306.000,- atau 92,85% dan realisasi Fisik 100%
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 22.889.000,- dengan realisasi keuangan Rp 12.902.000,- atau 56,37% dan realisasi fisik 100%
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan sebanyak 6 dokumen dan realisasi 6 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 243.277.552,- dengan realisasi keuangan Rp 202.455.072,- atau 83,22% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 790.788,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 64.524.110.259,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 63.989.356.158,- atau 99,17%, dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 3.163.152,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Indikator Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN selama 1 Tahun (12 bulan) dan realisasi 12 bulan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 64.245.748.951,- dengan realisasi keuangan Rp 63.756.574.926,- atau 99,24% dan realisasi fisik 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 8.909.200,- atau 98,99% dan realisasi fisik 100%
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi dengan target 100 Laporan dan realisasi 100 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 157.844.604,- dengan realisasi keuangan Rp 127.200.138,- atau 80,59% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.581.576,-
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan keuangan akhir Tahun yang di susun dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp 3.000.000,- atau 53,57% dan realisasi fisik 100%
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan keuangan akhir Tahun yang di susun dengan target 18 Laporan dan realisasi 18 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 103.444.704,- dengan realisasi keuangan Rp 91.857.644,- atau 88,80% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.581.576,-
- 6) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.472.000,- dengan realisasi keuangan Rp 2.397.000,- atau 96,97% dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 226.739.181,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 202.143.316,- atau 89,15%, dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 2.767.758,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Indikator Sub Kegiatan Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 114.000.653,- dengan realisasi keuangan Rp 111.124.158,- atau 97,48% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.186.182,-
  - 2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 112.738.528,- dengan realisasi keuangan Rp 91.019.158,- atau 80,73% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.186.182,-.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 504.749.084,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 306.532.971,- atau 60,73%, dan realisasi fisik 75%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 3.558.546,-, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pegawai yang dikelola Administrasi Kepegawaiannya dengan target 1000 orang dan realisasi 320 orang (32%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar

Rp 416.511.084,- dengan realisasi keuangan Rp 306.532.971,- atau 73,60% dan realisasi fisik 75%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 3.558.546,-

- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Indikator Sub Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan target 30 orang dan realisasi 0 orang (0%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 88.238.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi umum kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 2.082.943.732,- dengan realisasi keuangan Rp 730.596.012,- atau 35,08%, dan realisasi fisik 97,50%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 934.845.258,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia dengan target 35 Unit dan realisasi 35 Unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 131.422.352,- dengan realisasi keuangan Rp 99.916.122,- atau 76,03% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 790.788,-
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator Sub Kegiatan Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan dengan target 8 jenis dan realisasi 8 jenis (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.388.125.380,- dengan realisasi keuangan Rp 362.442.630,- atau 26,11% dan realisasi fisik 90%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 934.054.470,-



- 3) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan target 30 jenis dan realisasi 30 jenis (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 12.490.000,- dengan realisasi keuangan Rp 12.000.000,- atau 96,08% dan realisasi fisik 100%
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah orang yang melakukan konsultasi dengan target 30 orang dan realisasi 28 orang (93,33%) Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 550.906.000,- dengan realisasi keuangan Rp 266.845.260,- (48,44%) dan realisasi fisik 100%
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Provinsi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 299.358.300,- dengan realisasi keuangan Rp 34.700.000,- atau 11,59% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 259.574.300,-, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan dengan target 30 buah dan realisasi 30 buah (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 299.358.300,- dengan realisasi keuangan Rp 34.700.000,- atau 11,59% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 259.574.300,-
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 1.082.601.128,- dengan realisasi keuangan Rp 639.190.644,- atau 59,04% dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Sub Kegiatan Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.082.601.128,- dengan realisasi keuangan Rp 690.308.114,- atau 63,76% dan realisasi fisik 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemilihan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 2.065.453.880,- dengan realisasi keuangan Rp 640.280.049,- atau 31,00%, dan realisasi fisik 91,67%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.220.899.174,-, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.  
Indikator Sub Kegiatan :
      - Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dibayarkan pajaknya dengan target 33 unit dan realisasi 24 unit (72,73%)
      - Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara dengan target 33 unit dan realisasi 28 unit (84,85%)Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 470.303.880,- dengan realisasi keuangan Rp 455.794.049,- atau 96,91% dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1.976.970,-
    - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah gedung yang dipelihara dan direhabilitasi dengan target 8 unit dan realisasi 8 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.010.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 49.950.000,- atau 4,96% dan realisasi fisik 90%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 859.122.204,-

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Indikator Sub Kegiatan jumlah sarana pendukung gedung kantor yang dipelihara dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 585.150.000,- dengan realisasi keuangan Rp 134.536.000,- atau 22,99% dan realisasi fisik 85%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 359.800.000,-

➤ **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**” yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan ketersediaan data dan informasi dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 288.404.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 199.834.192,- atau 69,29%, dan realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 72.000.000,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan Data dan Informasi yang di kumpulkan dengan target 84 laporan dan realisasi 80 laporan (95,24%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 208.040.300,- dengan realisasi keuangan Rp 120.194.192,- atau 57,77% dan realisasi fisik 70%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 72.000.000,-

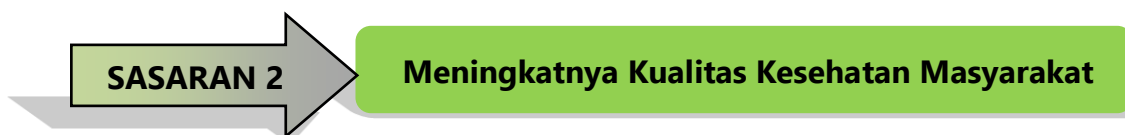
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah berita/Informasi yang diposting di website dengan target 200 berita/informasi dan realisasi 200 berita/informasi (100%)

- Jumlah sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan dengan target 10 sistem informasi dan realisasi 1 sistem informasi (10%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 80.364.000,- dengan realisasi keuangan Rp 79.640.000,- atau 99,10% dan realisasi fisik 100%.



Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” dengan tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Pencapaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan strategi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta mengendalikan penyakit. Sasaran ini juga diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.9  
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Angka Kematian Ibu	91/100.000 KH	119/100.000 KH	76,47%	Tinggi (T)
2.	Angka Kematian Bayi	5/1.000 KH	8/1000 KH	62,50%	Rendah (R)
3.	Prevalensi Balita Stunting	21,59 Persen	27,2 Persen	79,38%	Tinggi (T)
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				72,78%	Sedang (S)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” di atas memperlihatkan dari 3 (tiga) indikator kinerja belum ada yang mencapai target yang ditetapkan. Faktor penyebab belum tercapainya target akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan ini.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2020	2021	2022
1.	Angka Kematian Ibu	86/100.000 KH	129/100.000 KH	119/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	5/1.000 KH	5/1.000 KH	8/1000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	30,59%	27,4%	27,2 %

Hasil Pengukuran kinerja indikator Prevalensi Balita Stunting dibandingkan dengan capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya menunjukkan telah mengalami kenaikan persentase capaian kinerja (kinerja meningkat), artinya terjadi penurunan jumlah prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan. Sedangkan pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami kenaikan presentase capaian kinerja (kinerja meningkat) yang menunjukkan jumlah kasus kematian ibu menurun dari Tahun sebelumnya (Tahun 2021).

Selanjutnya diakui pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) terjadi penurunan persentase capaian kinerja dimana Angka Kematian Bayi meningkat, ini menunjukkan jumlah kasus kematian bayi di Sulawesi Selatan juga meningkat dari Tahun sebelumnya (Tahun 2021). Penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja di atas akan diuraikan lebih lanjut pada Bab ini.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.

Tabel III.11  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN  
 TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		2022	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Angka Kematian Ibu	119/100.000 KH	90/100.000 KH	205/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	8/1000 KH	4/1.000 KH	18,6/1.000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	27,2 %	21,59%	18,4 %

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, pencapaian kinerja indikator sasaran ini belum ada yang mencapai target jangka menengah yang ditetapkan. Begitupun juga bila dibandingkan dengan target Nasional tidak ada indikator yang capaiannya telah mencapai target (Angka Kematian masih di atas target Nasional) yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk Prevalensi Balita Stunting, Realisasi kinerja Sulawesi Selatan juga belum mencapai target yang ditetapkan (masih di atas target Prevalensi Nasional)

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian wanita yang terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/*incidental* (ICD 10, WHO).

Informasi mengenai tingginya kasus kematian ibu di suatu wilayah akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang

aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi serta meningkatkan derajat kesehatan reproduksi perempuan.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebanyak 174 kasus dan mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 21 kasus dari Tahun sebelumnya (Tahun 2021 = 195 kasus). Peningkatan jumlah kasus kematian ibu ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan, serta faktor sosial budaya. Terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil di Daerah Tertinggal, Terencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) juga turut mempengaruhi peningkatan kasus kematian ibu.

Sebaran kasus jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2  
KEMATIAN IBU DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 21 kasus disusul oleh Kabupaten Jeneponto 15 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian ibu terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 1 kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian ibu sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu Tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Penyebab terbanyak kematian ibu adalah Hipertensi dan Perdarahan. Perhitungan AKI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.12  
**ANGKA KEMATIAN IBU DI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018-2022**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	139	144	133	195	174
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	150.624	152.680	154.733	151.060	146.184
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	92	94	86	129	119

Selanjutnya secara terinci permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini akan disebutkan lebih lanjut.

## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AKB didefinisikan sebagai Jumlah kematian bayi usia dibawah satu Tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu Tahun tertentu

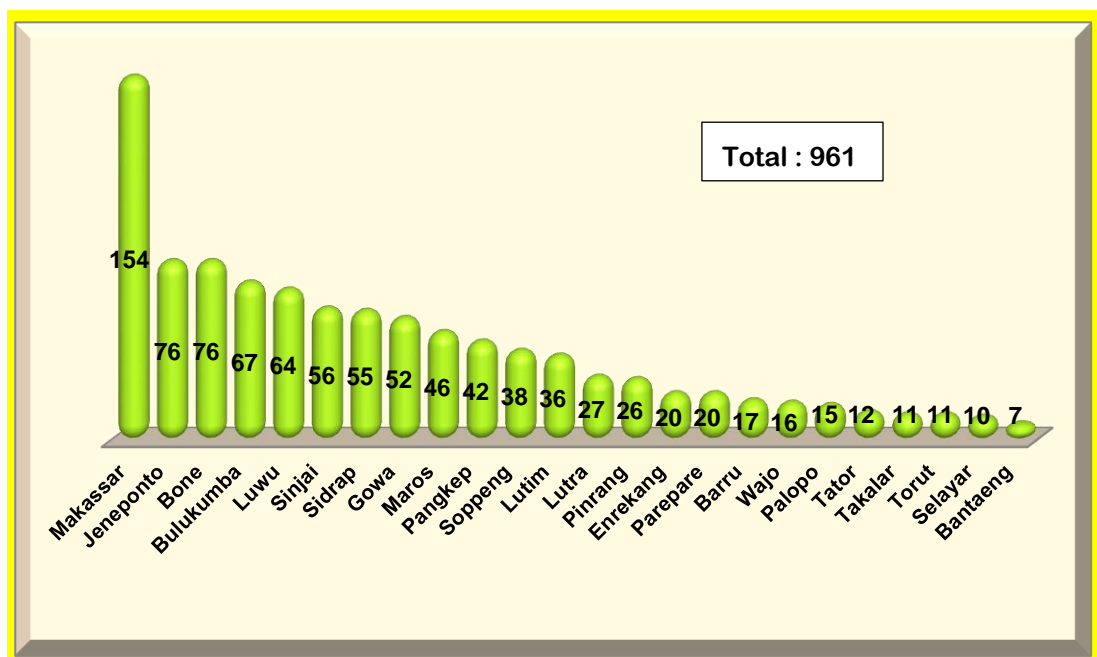


Jumlah kasus kematian bayi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan status sosial dari orang tua bayi tersebut. Bayi merupakan investasi SDM untuk masa yang akan datang. Kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Jumlah kasus kematian bayi selain merupakan indikator yang mengukur derajat kesehatan juga sebagai indikator yang menilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Pada Tahun 2020 Jumlah Kasus kematian bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 791 kasus, meningkat menjadi 844 kasus di Tahun 2021 dan sampai dengan penghujung Tahun 2022 Jumlah kasus kematian bayi tetap meningkat menjadi 961 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan perlunya ditingkatkan upaya-upaya yang lebih maksimal dalam menekan jumlah kasus kematian bayi. Kondisi ini diharapkan menjadi rujukan dalam evaluasi pencapaian program kependudukan dan dalam penentuan kebijakan di sektor kesehatan keluarga khususnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Data jumlah kasus kematian bayi neonatal (0-28 hari) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

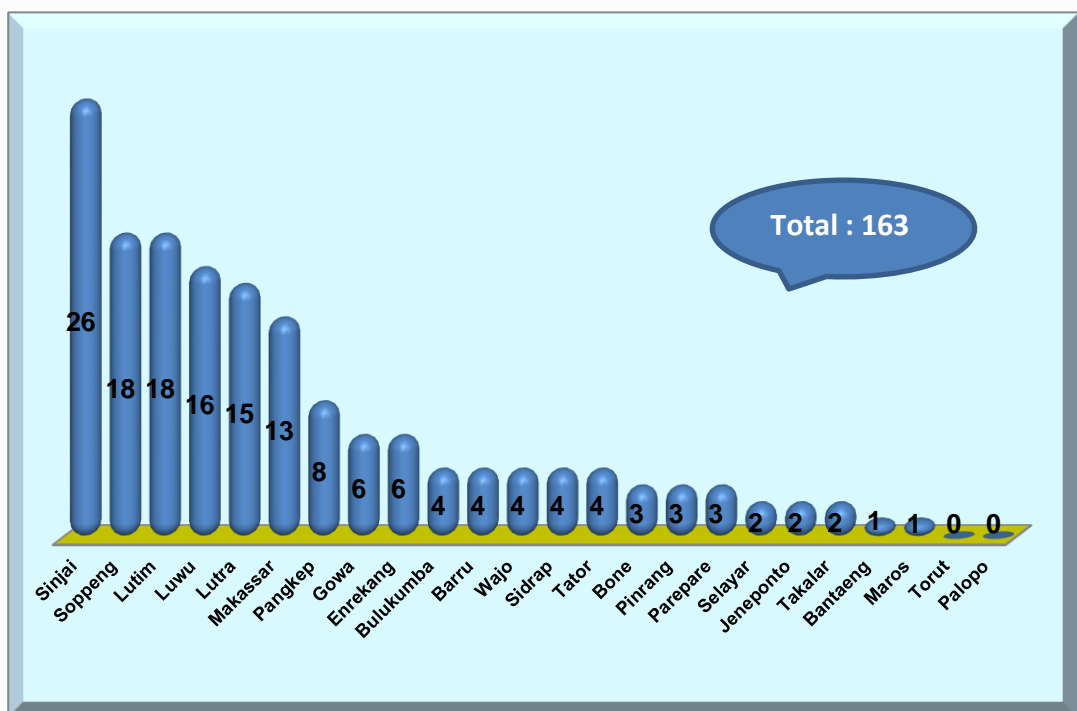
Grafik III.3  
KEMATIAN NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi usia 0-28 hari terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 154 kasus disusul oleh Kabupaten Jeneponto sebanyak 76 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian neonatal terendah ada di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah 7 kasus kematian.

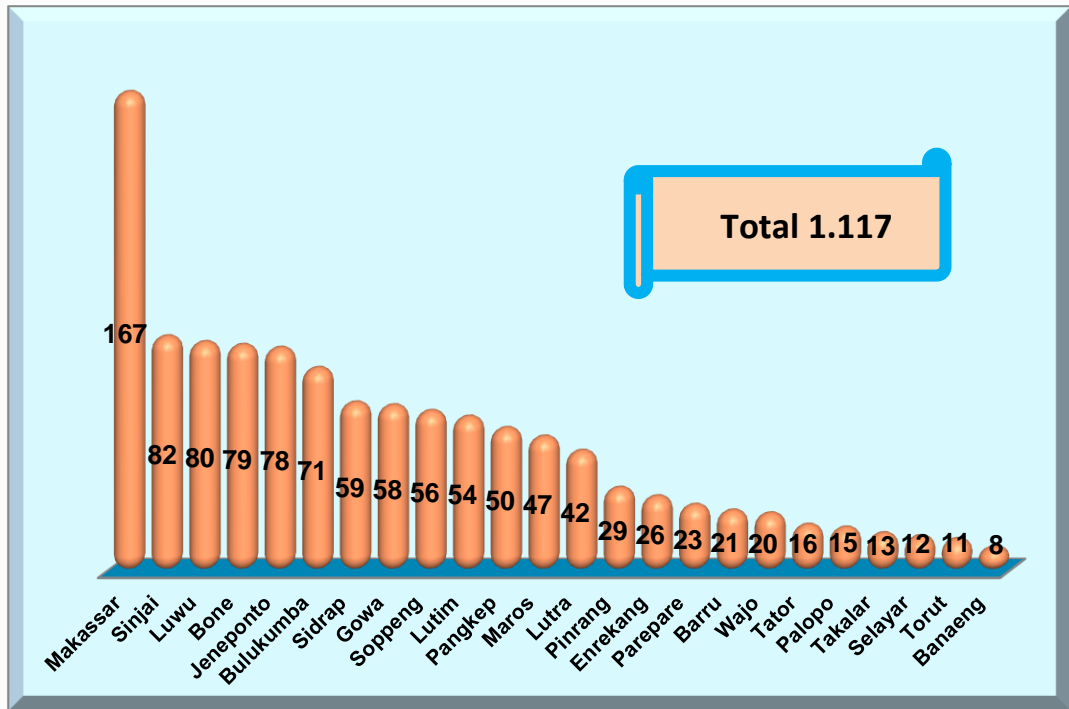
Sedangkan sebaran jumlah kasus kematian Bayi Post Neonatal (29 hari-11 bulan) seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.4  
**KEMATIAN POST NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan terbanyak berada pada Kabupaten Sinjai sebanyak 26 kasus disusul oleh Kabupaten Soppeng sebanyak 18 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian Post Neonatal terendah ada di Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 0 kasus kematian.

Grafik III.5  
**KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 167 kasus disusul oleh Kabupaten Sinjai sebanyak 82 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Bantaeng dengan 8 jumlah 8 kasus kematian.

Berdasarkan jumlah total kematian bayi diatas, nampak bahwa lebih dari 2/3 kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) itu terjadi pada masa neonatal (usia 0 – 28) hal ini berkaitan dengan kondisi dan kualitas kesehatan ibu pada saat hamil dan melahirkan, kemudian deteksi faktor risiko, kompetensi petugas dan dukungan sarana prasarana untuk penanganan neonatal esensial.

Angka Kematian Bayi diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian bayi sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu Tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKB di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.13  
**ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN  
 TAHUN 2018-2022**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 Tahun	Orang	1.037	919	791	844	961
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	150.624	152.680	154.733	151.060	146.184
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 1.000 KH)	6	6	5	5	8

Dari tabel di atas, terlihat di Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 117 kasus. Fenomena 2/3 kematian bayi, terjadi pada masa neonatal (0-28 hari) yang penyebabnya terbanyak adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia, Penyebab kematian bayi (Post Neonatal) adalah adanya penyakit pneumonia dan diare. Beberapa permasalahan lainnya akan dikemukakan selanjutnya pada poin permasalahan.

### **3. *Prevalensi Balita Stunting***

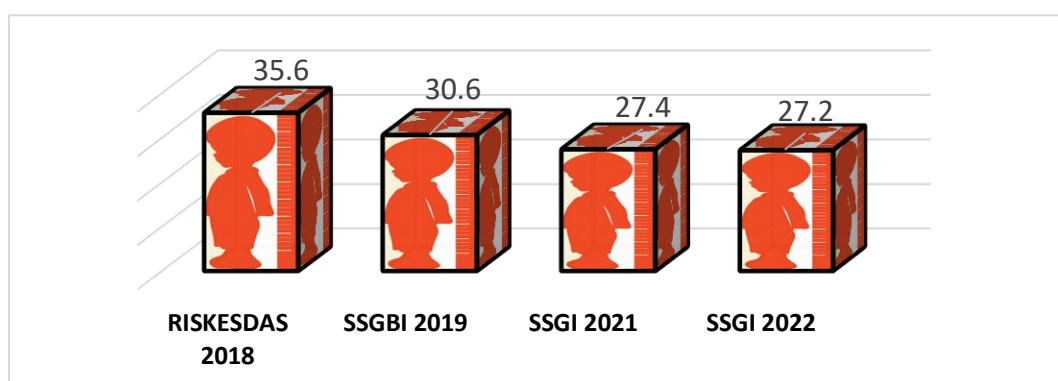
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia 2 Tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no.2 Tahun 2020. Seorang anak dikatakan mengalami stunting apabila tinggi badan dan panjang tubuhnya minus 2 dari standar *Multicentre Growth Reference Study* atau standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

Stunting disebabkan oleh multifaktor dan membutuhkan penanganan multisektoral. Stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan dimulai dari janin hingga sang anak menginjak usia 2 Tahun. Kurangnya pengetahuan dan edukasi pada ibu hamil tentang pentingnya gizi saat kehamilan dan pemenuhan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga menjadi faktor penting dalam menyebabkan kondisi stunting. Kondisi kesehatan ibu hamil sendiri juga turut mempengaruhi terjadinya kondisi stunting. Ibu hamil yang menderita penyakit tertentu meningkatkan resiko stunting pada janin yang dikandung. Selain itu, wanita yang hamil pada usia remaja juga berisiko sebab akan terjadi semacam persaingan perebutan nutrisi antara tubuh ibu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan juga perkembangan janin.

Kondisi sanitasi, kebersihan lingkungan dan akses air bersih yang buruk bisa meningkatkan potensi terjadinya infeksi penyakit seperti diare dan malaria. Kebersihan yang minim menyebabkan tubuh harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melawan sumber penyakit. Penyakit infeksi yang disebabkan *hygiene* atau buruknya sanitasi bisa mengganggu penyerapan nutrisi pada sistem pencernaan. Kebutuhan akan air bersih juga juga bisa mencegah anak dan keluarga dari risiko infeksi penyakit.

Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan *trend* penurunan, Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.6  
**PREVALENSI BALITA STUNTING  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

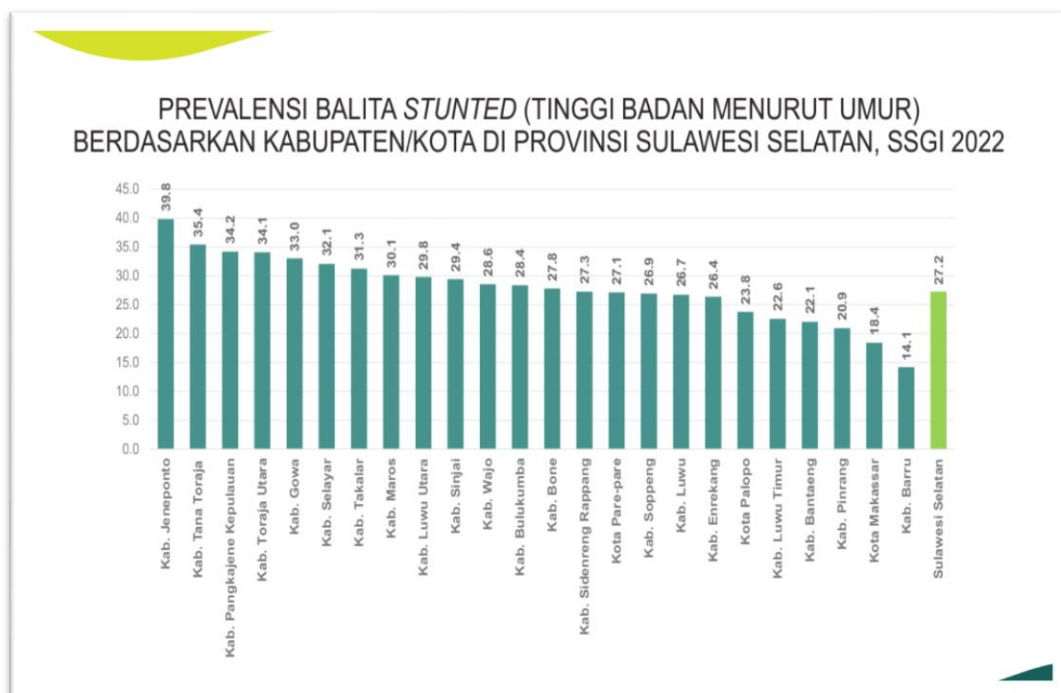


Berdasarkan grafik diatas, Data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, Prevalensi Stunting di Sulawesi Selatan sebesar 35,6%, mengalami penurunan menjadi 30,6% (SSGBI 2019), Tahun 2021 menurun

menjadi 27,4% (SSGI 2021) dan Tahun 2022 menurun menjadi 27,2%. Akan tetapi prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 21,4%.

Sebaran Prevalensi Stunting di 24 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.7  
**PREVALENSI BALITA STUNTING  
 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



Dari grafik di atas terlihat Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunting tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 39,8% disusul oleh Kabupaten Tana Toraja sebesar 35,4%. Sedangkan Kabupaten dengan prevalensi balita stunting terendah adalah Kabupaten Barru sebesar 14,1%.

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan bahwa intervensi penanggulangan stunting mencakup intervensi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor dan intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh sektor Kesehatan.

Menurut “The Lancet” (2021) Penanggulangan stunting melalui intervensi gizi spesifik pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terbukti efektif dan berkontribusi 30% dalam menurunkan prevalensi stunting, jika cakupan intervensi gizi spesifik tersebut mencapai minimal 90% sedangkan intervensi sensitive yang melibatkan berbagai sektor selain Kesehatan

berkontribusi 70% dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Intervensi Spesifik pencegahan stunting meliputi Pencegahan terjadinya masalah gizi pada ibu hamil dan balita, mulai dari menjaga kesehatan dan status gizi ibu saat sebelum dan selama kehamilan, dilanjutkan pada masa menyusui, semua bayi mendapat ASI eksklusif, semua balita (bawah dua Tahun) mendapat Makanan Pendamping ASI tinggi protein hewani serta memastikan setiap anak balita mengkonsumsi makanan keluarga dengan nilai gizi yang sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Sebagai gerbang utama Indonesia bagian timur, Sulawesi Selatan memiliki visi mewujudkan masyarakat yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting melalui Aksi Stop Stunting. Program ini merupakan salah satu program Prioritas untuk memperbaiki status gizi anak pada periode emas pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Aksi Stop Stunting sebelumnya disebut GAMMARA'NA (Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting), dicanangkan sejak Tahun 2019 bertujuan untuk menurunkan Prevalensi Stunting menjadi 14% pada Tahun 2024. Kegiatan ini telah memasuki Tahun keempat dimana pada Tahun pertama Program dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Enrekang dengan jumlah desa lokus sebanyak 70 desa. Selanjutnya Tahun 2021 dilaksanakan Kembali di Kabupaten Bone dan Enrekang dengan jumlah lokus 85 desa.

Tahun 2022 Aksi Stop Stunting hadir dengan Jangkauan desa lokus yang lebih luas yaitu 10 desa lokus tertinggi prevalensi stunting di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan total 240 desa lokus stunting. Untuk Tahun 2023, Program Aksi stop stunting melakukan intervensi di 120 desa lokus dari 24 kabupaten/Kota.

Kegiatan Aksi Stop Stunting meliputi penempatan tenaga pendamping gizi dan Pemberian Paket intervensi gizi di desa lokus stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Selain fokus pada intervensi spesifik, tenaga pendamping gizi desa juga diharapkan fokus pada upaya keberlanjutan program penurunan stunting di desa melalui *transfer knowledge* antara tenaga pendamping gizi desa dengan Tokoh masyarakat, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM),

Organisasi kemasyarakatan, Lintas Sektor dan Program di desa.

Adapun bentuk intervensinya adalah terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pemberian paket intervensi gizi kepada kelompok sasaran, terdiri dari :
  - Multivitamin untuk balita gizi kurang (kurus) sebanyak 25.072 baduta
  - Suplemen makanan bagi ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 3.534 ibu hamil
- 2) Pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil, yaitu sebanyak 240 orang tenaga pendamping gizi, dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebanyak 10 Petugas Gizi Pendamping ditempatkan di 10 desa lokus di 24 Kabupaten/Kota

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :**

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota baik berupa Regulasi, anggaran (bantuan dana stimulant/DAK/Jampersal), dana bansos/sharing untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kesehatan gratis, dana tanggap bencana/KLB, dan lain-lain)
2. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bermitra dengan BPJS yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan kesehatan secara merata dan mampu menciptakan akses pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga-tenaga kontrak *spesialistik* dan *internship*.
4. Adanya kelompok-kelompok UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang melaksanakan upaya surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, KIA, Gizi, Lingkungan dan Perilaku) dan Tingkat



keaktifan kader Posyandu dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.

5. Kemajuan teknologi informasi yang mempermudah penyampaian pesan-pesan kesehatan, berimbas kepada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga dapat memperbanyak dan memperkuat jejaring/mitra dalam implementasi program/kegiatan pembangunan kesehatan.
6. Adanya aplikasi pelaporan berbasis elektronik yang diharapkan dengan efektif dan cepat diperoleh data keefektifan koordinasi data dan permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mempermudah dalam proses analisa, pengambilan solusi/keputusan dan penentuan kebijakan.
7. Upaya Penanganan Stunting Terintegrasi yang dituangkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penanganan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :**

1. Belum semua Kabupaten/Kota membentuk tim AMP-SR *Audit Maternal* dan *Perinatal Surveilans Respond* yang berperan untuk mengkaji kasus-kasus kematian Ibu dan Bayi.
3. Faktor keterlambatan pengambilan keputusan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan berimbas pada terlambatnya penanganan . Selain itu adanya faktor 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat Jarak Kehamilan dan Terlalu banyak anak) yang menambah tingkat resiko tinggi kehamilan.
4. Adanya Penyakit Infeksi dan penyakit penyerta yang merupakan dampak dari kekurangan gizi dalam jangka waktu lama berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu, ibu hamil dan balita. Selain itu kondisi kesehatan lingkungan sekitar yang tidak sehat juga berperan menyebabkan munculnya penyakit infeksi.
5. Faktor ekonomi yang berpengaruh pada penyediaan pangan keluarga dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6. Mobilitas tenaga kesehatan yang sudah dilatih masih cukup tinggi, proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan permasalahan sama di setiap Tahun dari

sisi jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional, tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.

7. Belum optimalnya semua sektor berperan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggung jawab dirasa hanya pada OPD teknis yang bersangkutan langsung sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal.

**Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:**

1. Pembentukan Tim AMP-SR *Audit Maternal dan Perinatal Surveilans Responds* di Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Peningkatan deteksi dini dan edukasi keluarga/suami siaga.
3. Peningkatan surveilans epidemiologi dan Gizi, peningkatan promosi kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi.
4. Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang (kurus). Selain itu pemberian stimulant baik berupa material atau pendidikan keterampilan yang mendukung terbukanya peluang kerja bagi masyarakat tidak mampu.
5. Pembatasan mutasi untuk pegawai yang sudah terlatih. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional
6. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.

#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp 149.457.114.733,- dengan realisasi sebesar Rp 98.074.444.341,- atau 65,62%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 72,78%, maka terdapat efisiensi pada penggunaan sumber daya sebesar 10,91%. Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 97,29% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 65,62%, maka terdapat efisiensi sebesar 48,21%.

Pada tahun 2022 terdapat anggaran yang mendukung sasaran ini namun belum terealisasi yaitu sebesar Rp 39.685.951.664,- sehingga total anggaran yang digunakan untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp 137.760.396.005,-.

Tabel III.8  
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.162.531.833,-	95.243.013.619,-	65,16%	89,18%	36,85%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.664.625.900,-	1.432.902.264,-	86,08%	100%	16,67%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	337.315.000,-	298.889.900,-	88,61%	100%	13,51%

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.292.642.000,-	1.099.638.558,-	85,07%	100%	17,55%
	<b>JUMLAH</b>	<b>149.457.114.733,-</b>	<b>98.074.444.341,-</b>	<b>65,62%</b>	<b>97,72%</b>	<b>48,21%</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat didukung sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Untuk mendukung sasaran ini terdapat 3 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.162.531.833,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 114.827.841.059,- atau 78,56% dan realisasi fisik 89,18%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 39.685.951.664,-

Indikator Capaian Program :

- Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan target sebesar 7% dan Realisasi 5,79%.
- Persentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Target Renstra dengan target sebesar 12,5% dan realisasi 9,66%.
- Persentase Penduduk/Warga pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM), dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

- Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan dengan target sebesar 50% dan realisasi 16,67%.
- Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi dengan target sebesar 90% dan Realisasi 80%.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan ketersediaan sarana prasarana dan alkes UKP dan UKM Rujukan dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 121.802.095.071,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 75.277.363.479,- atau 61,80%, dan realisasi fisik 96,23%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 39.604.904.148,-

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya dengan target 1 unit dan realisasi sementara pembangunan 1 unit Rumah Sakit Regional Bone. Pembangunan Rumah Sakit ini dilaksanakan *Multi Years* (2021- 2023) dengan *progress* fisik pembangunan 42,12%. Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 107.958.889.935,- dengan realisasi keuangan Rp 62.434.643.664,- atau 57,83% dan realisasi fisik 96%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 39.296.264.148,-
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah alat kesehatan Brigade siaga bencana (BSB) yang diadakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket (100%).
- Jumlah alat kesehatan Rest Area yang diadakan dengan target 2 paket dan realisasi 0 paket (0%).
- Jumlah alat kesehatan yg diadakan (UPK) dengan target 10 jenis dan realisasi 10 jenis (100%).

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.533.915.996,- dengan realisasi keuangan Rp 1.364.246.500,- atau 88,94% dan realisasi fisik 90%

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di fasilitas layanan Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jumlah sarana di UPK yang tersedia dengan target 2 paket dan realisasi 2 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 777.948.120,- dengan realisasi keuangan Rp 604.123.537,- atau 77,66% dan realisasi fisik 97,62%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 100.000.000,-
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah alat Kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan di UPK yang tersedia dan terpelihara dengan target 2 paket dan realisasi 2 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 78.859.800,- dengan realisasi keuangan Rp 77.520.000,- atau 98,30% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas layanan kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan (UPK dan Gudang Farmasi) yang dipelihara dengan target 3 paket dan realisasi 3 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.132.226.400,- dengan realisasi keuangan Rp 826.519.024,- atau 73% dan realisasi fisik 90%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 159.890.000,-
- 4) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 344.381.000,- dengan realisasi keuangan Rp 280.390.088,- atau 81,42% dan realisasi fisik 90%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 48.750.000,-

- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah item obat yg disiapkan sebagai *Buffer Stock* Provinsi dengan target 25 item obat dan realisasi 25 item obat (100%)
- Jumlah obat-obatan bahan kimia, bahan laboratorium, bahan logistik Kesehatan UPK dengan target 150 Jenis dan realisasi 150 Jenis (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 9.975.873.820,- dengan realisasi keuangan Rp 9.689.920.666,- atau 97,13% dan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Cakupan layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 23.936.321.162,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.549.993.625,- atau 81,68%, dan realisasi fisik 84,24%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 81.047.516,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana.

Indikator Sub Kegiatan :

- Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid -19) dan pandemi lainnya dengan target 100% dan realisasi 100% (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.078.075.600,- dengan realisasi keuangan Rp 518.608.700,- atau 48,11% dan realisasi fisik 70%.

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Indikator Sub Kegiatan Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid -19) dan pandemi lainnya dengan target Jumlah KLB Penyakit Menular yang tertangani dengan target 35 kejadian dan realisasi 8 kejadian (22,86%).

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.297.830.000,- dengan realisasi keuangan Rp 252.907.000,- atau 19,49% dan realisasi fisik 22,85%.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang di lakukan Monev dalam rangka Verifikasi pencatatan dan pelaporan data KIA di Kabupaten/Kota dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi e-Kohort di Tingkat Provinsi dengan target 140 orang dan realisasi 140 orang (100%)
- Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi Maternal prinal Death Notification (MPDN) bagi petugas kesehatan di RS Provinsi dan RS Kota Makassar dengan target 140 orang dan realisasi 140 orang (100%)
- Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dalam rangka pemantauan pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Prinal Surveilans dan Respon) Bagi petugas Kabupaten/Kota dengan target 140 orang dan realisasi 139 orang (99,28%)
- Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Data KIA di Tingkat Provinsi dengan target 120 orang dan realisasi 120 orang (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 900.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 814.255.607,- atau 90,47% dan realisasi fisik 100%.

4) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Usia Lanjut.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut dalam penilaian posyandu lansia dengan target 14 Kabupaten/Kota dan realisasi 14 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah peserta Orientasi Pemberdayaan lansia tingkat Provinsi dengan target 90 orang dan realisasi 90 orang (100%)



Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 261.159.800,- dengan realisasi keuangan Rp 237.428.045,- atau 90,91% dan realisasi fisik 100%.

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah intervensi Micronutrient pada anak Umur 6-24 Bulan dengan target 11.603 orang dan realisasi 25.072 orang (216%)
- Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada anak yang terlaksana tingkat Provinsi dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada ibu Hamil yang terlaksana dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 10.293.203.273,- dengan realisasi keuangan Rp 9.795.152.543,- atau 95,16% dan realisasi fisik 100%.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan Kesehatan Kerja Kesehatan dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah peserta pertemuan GP2SP dalam rangka Peningkatan Produktifitas Kerja dengan target 45 orang dan realisasi 30 orang (75%)
- Jumlah peserta pertemuan perencanaan dan evaluasi Program Kesehatan kerja dan olahraga dengan target 60 orang dan realisasi 60 orang (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 381.890.000,- dengan realisasi keuangan Rp 294.250.000,- atau 77,05% dan realisasi fisik 100%.

7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah desa STBM yang dilaksanakan bimbingan teknis dengan target 24 Desa dan realisasi 24 Desa (100%)
- Jumlah Kawasan Sehat melalui Pendekatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 312.190.500,- dengan realisasi keuangan Rp 253.129.000,- atau 81,08% dan realisasi fisik 100%.

8) Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiridan tradisonal lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi program pelayanan kesehatan Tradisional di Kabupaten/Kota dengan target 75 orang dan realisasi 68 orang (90,67%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 86.972.800,- dengan realisasi keuangan Rp 85.972.800,- atau 98,85% dan realisasi fisik 100%.

9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%)
- Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan peningkatan kapasitas, Bimtek, pemantauan supervisi program penyakit menular dan tidak menular dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.435.684.600,- dengan realisasi keuangan Rp 865.828.766,- atau 60,31% dan realisasi fisik 80%.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Haji dengan target 9 Kabupaten/Kota dan realisasi 9 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah Peserta Workshop Orientasi Sistem Informasi Haji dengan target 86 orang dan realisasi 48 orang (55,81%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 254.040.600,- dengan realisasi keuangan Rp 215.396.600,- atau 84,79% dan realisasi fisik 100%.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK). Indikator Sub Kegiatan Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 55.980.000,- dengan realisasi keuangan Rp 52.958.000,- atau 94,60% dan realisasi fisik 100%.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA. Indikator Sub Kegiatan Jumlah calon pengantin yang melakukan pemeriksaan Narkoba Pra Nikah dengan target 3.446 Orang dan realisasi 2.955 orang (85,75%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 699.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp 680.230.000,- atau 97,20% dan realisasi fisik 100%.

13) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota sasaran advokat dan sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju universal Health Coverage (UCH) 2019 dengan target 18 Kabupaten/Kota dan realisasi 18 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah Kabupaten/Kota sasaran Bimtek Program kesehatan gratis dengan target 18 Kabupaten/Kota dan realisasi 18 Kabupaten/Kota (100%)

- Jumlah Kab/Kota Sasaran Monitoring Dan Evaluasi pelayanan kesehatan Gratis integrasi ke JKN dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
  - Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Dalam Rangka Pemanjapan Kesehatan Gratis Integrasi Ke Program JKN dengan target 100 orang dan realisasi 100 orang (100%)
  - Jumlah peserta Rekonsiliasi data kepesertaan PBI-JK dan PBPB APBD dengan target 55 orang dan realisasi 55 orang (100%)
- Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 318.433.750,- dengan realisasi keuangan Rp 211.371.828,- atau 66,38% dan realisasi fisik 100%.

14) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%)
- Jumlah Kabupaten/Kota yang di lakukan peningkatan Kapasitas, Bimtek, Pemantauan dan supervisi pelaksanaan program surveilans dan imunisasi dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 760.583.000,- dengan realisasi keuangan Rp 564.104.860,- atau 74,17% dan realisasi fisik 100%.

15) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Mobiler BSB dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket (100%)
- Jumlah Mobiler Rest Area dengan target 2 paket dan realisasi 2 paket (100%)
- Terlaksananya pelayanan Kesehatan di UPK dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.727.159.239,- dengan realisasi keuangan Rp 4.708.399.876,- atau 82,21% dan

realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 81.047.516,-

16) Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat Massal oleh Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah dokumen hasil investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian Obat massal oleh Kabupaten/Kota dengan target 0 paket dan realisasi 0 paket (0%)
- Jumlah KIPI yang dilakukan Pendampingan dengan target 12 kejadian dan realisasi 0 kejadian (0%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 73.268.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di terbitkan dengan target 100% penduduk dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 424.115.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 380.822.700,- atau 89,79%, dan realisasi fisik 92%.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit.

Indikator Sub Kegiatan :

- Berkembangnya Layanan Unggulan / Spesifikasi RS Provinsi dengan target 2 RS dan realisasi 2 RS (100%)
- Jumlah Peserta Pelaporan SIRS Online Bagi Petugas Rekam Medik RS dengan target 110 orang dan realisasi 105 orang (95,45%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 212.581.900,- dengan realisasi keuangan Rp 170.639.000,- atau 80,27% dan realisasi fisik 84%.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah peserta rapat Kordinasi Teknis Penyusunan SPM-RS dengan target 81 orang dan realisasi 81 orang (100%).
- Terbentuknya Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsidengan target 1 Badan Pengawas dan realisasi 1 Badan Pengawas (100%).

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 211.533.700,- dengan realisasi keuangan Rp 210.183.700,- atau 99,36% dan realisasi fisik 100%.

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Untuk mendukung sasaran ini terdapat 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.664.625.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.432.902.264,- atau 86,08%, dan realisasi fisik 100%. Indikator Capaian Program ini adalah Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk (Prioritas) dengan target sebesar 23 per 100.000 Penduduk dan Realisasi 23,97 per 100.000 Penduduk (104,22%). Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan kebutuhan sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Pemenuhan SDM di Unit Pelayanan Kesehatan dengan target 100% dan realisasi 78,48% (78,48%). Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 389.012.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 362.778.800,- atau 93,26%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sumber daya Manusia Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota yang terdata dengan target 16 jenis profesi dan realisasi 22 jenis profesi (137,5%)

- Jumlah Kabupaten/Kota yang sasaran pelaksanaan advokasi pemenuhan 5 jenis Profesi tenaga kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di Kabupaten/Kota dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
  - Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai analisis beban kerja dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
  - Jumlah peserta koordinasi dalam upaya pemenuhan nakes di Kabupaten/Kota dengan target 78 orang dan realisasi 78 orang (100%)
  - Jumlah peserta sosialisasi Upaya Pemenuhan Tenaga Kesehatan dengan target target 30 orang dan realisasi 30 orang (100%)
- Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 389.012.000,- dengan realisasi keuangan Rp 362.778.800,- atau 93,26% dan realisasi fisik 96%.

2. Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Peningkatan kompetensi Teknis Tenaga SDMK dengan target 100% dan realisasi 91,01% (91,01%). Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 1.275.613.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.070.123.464,- atau 83,89%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah jenis uji kompetensi Jabatan Fungsional kesehatan yang disosialisasikan dengan target 8 Jabatan Fungsional dan realisasi 8 Jabatan Fungsional (137,5%)
- Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan e-logistik dan e-Purchasing dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)

- Jumlah peserta perundang-undangan *SDMK* dengan target 107 orang dan realisasi 107 orang (100%)
- Jumlah tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi sulawesi selatan yang terpilih dengan target 28 orang (10 kategori) dan realisasi 28 orang (100%)
- Jumlah tenaga kesehatan yang di bekali dalam penerapan *POR* (Penggunaan obat Rasional) dengan target target 150 orang dan realisasi 150 orang (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 804.822.800,- dengan realisasi keuangan Rp 729.327.764,- atau 90,62% dan realisasi fisik 100%.

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan Alkes dalam negeri dengan target 24 Sarana *PAK/PKRT* dan realisasi 24 Sarana *PAK/PKRT* (100%)
- Jumlah kader yang di bina dalam Produksi makanan dengan target 70 Orang dan realisasi 70 Orang (100%)
- Jumlah masyarakat yang menggunakan Alkes dan *PKRT* yang baik dengan target 60 Orang dan realisasi 60 Orang (100%)
- Jumlah pemantauan Program sumber daya Kesehatan pada Kabupaten/Kota dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabupaten/Kota (100%)
- Jumlah peserta pertemuan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dengan target 70 Orang dan realisasi 70 Orang (100%)
- Jumlah produsen makanan khusus yang beredar dan telah diidentifikasi serta di petakan dengan target target 50 Produsen dan realisasi 50 Produsen (100%)
- Jumlah sarana *PAK* yang mengusulkan permohonan sertifikat *CDAKB* dengan target target 20 sarana Alkes dan realisasi 20 sarana Alkes (100%)



- Jumlah Sumber Daya Kesehatan (SDMK) yang mampu melaksanakan surveilans Produk dengan target 58 Orang dan realisasi 58 Orang (100%)
- Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 470.791.100,- dengan realisasi keuangan Rp 340.795.700,- atau 72,39% dan realisasi fisik 100%.

➤ **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Untuk mendukung sasaran ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.315.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 298.889.900,- atau 88,61%, dan realisasi fisik 100%. Indikator Capaian Program Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi Alat kesehatan dan makanan Minuman sesuai standar dengan target sebesar 95% dan Realisasi 85% (89,47%). Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penerbitan pengakuan pedagang besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang penyalur alat kesehatan (PAK). Indikator Capaian Persentase Pengakuan pedagang besar Farmasi Cabang dan cabang Penyakur alat kesehatan dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 337.315.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 298.889.900,- atau 88,61%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Alat Kesehatan dan PKRT dengan target 24 Kabuapten/Kota dan realisasi 24 Kabuapten/Kota unit (100%)
- Jumlah sampel produk alat kesehatan dan PKRT yang di uji di laboratorium Uji. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Alat Kesehatan Dan PKRT dengan target 2 jenis sampel dan realisasi 2 jenis sampel (100%)

- Jumlah sarana yang di survei dan tersertifikasi. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Program Alat Kesehatan Dan PKRT dengan target 20 sarana dan realisasi 20 sarana (100%).
- Jumlah Sarana yang telah tersosialisasikan dengan Per UU No. 24 Tahun 2018. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Program Alat Kesehatan dan PKRT dengan target 80 sarana dan realisasi 80 sarana (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 217.222.500,- dengan realisasi keuangan Rp 189.780.028,- atau 87,37% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah sarana distribusi dan produksi alkes dan PKRT Yang memenuhi cara pembuatan dan distribusi yang baik dengan target 80 Alkes dan PKRT dan realisasi 80 Alkes dan PKRT (100%)
- Jumlah sarana yang sudah di survei dalam rangka perizinan dengan target 30 Sarana PAK/PKRT dan realisasi 30 Sarana PAK/PKRT (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 120.092.872,- dengan realisasi keuangan Rp 109.109.872,- atau 90,85% dan realisasi fisik 100%.

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Untuk mendukung sasaran ini terdapat 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.292.642.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.099.638.558,- atau 85,07%, dan realisasi fisik 100%. Indikator Capaian Program ini adalah Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS dengan target sebesar 75% dan Realisasi 87,5% (116,67%).

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Provinsi. Indikator Cakupan Pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta Masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 199.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 190.584.000,- atau 95,34%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi. Indikator Sub Kegiatan diperolehnya capaian indeks keluarga sehat (IKS) di Kabupaten/Kota dengan target 24 Kabuapten/Kota dan realisasi 24 Kabuapten/Kota unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp 199.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 190.584.000,- atau 95,34%, dan realisasi fisik 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang di lakukan monev Germas dengan target 24 Kabupaten/Kota dan realisasi 24 Kabuapten/Kota unit (100%)
- Jumlah penyebarluasan informasi melalui Media Cetak dengan 8 Paket dan realisasi 8 Kabuapten/Kota unit (100%)
- Terlaksananya penggerakan Masyarakat melalui Aktivitas Fisik , Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan edukasi Gizi Seimbang Tingkat Provinsi dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%)
- Terlaksanananya Peran UKBM dalam Germas dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%)

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp 1.092.742.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 909.054.558,- atau 83,19%, dan realisasi fisik 100%.

## C. REALISASI ANGGARAN

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa hal antara lain :

- a) Monitoring tidak langsung melalui pelaporan rutin (bulanan dan triwulan).
- b) Monitoring langsung melalui pertemuan evaluasi dan monitoring yang juga dilaksanakan secara berkala (bulanan, triwulanan dan Tahunan).

Berikut penyajian Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT/UPK yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang kesehatan :

### a. Kondisi Pendapatan Daerah

#### 1. Dinas Kesehatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.882.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.633.126.200,- (67,32%), yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dengan perincian sebagai berikut :

##### 1) Retribusi Jasa Umum

Dengan target pendapatan sebesar Rp 6.862.750.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.613.506.200,- (67,23%).

Terdiri atas :

##### - Retribusi Pelayanan Kesehatan

✚ UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp 960.000.000,- dan realisasi Rp 781.972.600,- (81,46%)

✚ UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika dengan target pendapatan sebesar Rp 5.902.750.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.831.533.600,- (64,91%)

##### 2) Retribusi Jasa Usaha

Dengan target pendapatan sebesar Rp 19.620.000,- dan realisasi sebesar Rp 19.620.000,- (100%).

## 2. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT RSKD Dadi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 35.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.857.323.263,- (111,02%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 2.575.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.114.208.461,- (120,92%)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dan Asuransi Lainnya  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 29.573.785.313,- dan realisasi sebesar Rp 32.395.240.917,- (109,54%)
- Pendapatan lain-lain yang sah  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 2.850.714.687,- dan realisasi sebesar Rp 3.347.873.885,- (117,44%)

## 3. UPT Rumah Sakit Sayang Rakyat

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Rumah Sakit Sayang Rakyat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.004.200.000,- dengan realisasi Rp 18.589.282.779,- (109,32%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 1.076.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.431.109.793,- (133%)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dan Asuransi Lainnya  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 15.120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.385.271.625,- (108,37%)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dan Asuransi Lainnya  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 15.120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.385.271.625,- (108,37%)
- Pendapatan lain-lain yang sah  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 808.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 772.901.361,- (95,63%)

#### 4. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT RSKD Ibu dan anak Pertiwi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12.000.000.000,- dengan realisasi Rp 10.683.079.060,- (89,03%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 11.777.400.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.471.179.352,- (88,91%)
- Pendapatan lain-lain yang sah  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 226.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 212.425.119,- (95,43%)

#### 5. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.000.000.000,- dengan realisasi Rp 12.544.313.964,- (96,49%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 11.419.034.500,- dan realisasi sebesar Rp 10.981.715.950,- (96,17%)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dan Asuransi Lainnya  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 1.287.965.500,- dan realisasi sebesar Rp 1.287.965.500,- (100%)
- Pendapatan lain-lain yang sah  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 31.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 35.664.614,- (115,05%)
- Pemakaian Kekayaan Daerah  
Dengan target pendapatan sebesar Rp 262.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 238.967.900,- (91,21%)

## 6. UPT Rumah Sakit Sakit Gigi dan Mulut

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 10.500.000.000,- dengan realisasi Rp 4.068.372.918,- (38,75%), yang terdiri atas:

- Pendapatan lain-lain yang sah

Dengan target pendapatan sebesar Rp 10.500.000.000,- dengan realisasi Rp 4.068.372.918,- (38,75%)

## 7. UPT Pelatihan Kesehatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Pelatihan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 175.550.000,- dengan realisasi Rp 176.727.700,- (100,67%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dengan target pendapatan sebesar Rp 140.150.000,- dengan realisasi Rp 127.817.700,- (91,20%)

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dengan target pendapatan sebesar Rp 35.400.000,- dengan realisasi Rp 48.910.000,- (138,16%)

## 8. UPT Unit Transfusi Darah (UTD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Unit Transfusi Darah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.000.000.000,- dengan realisasi Rp 9.323.201.700,- (84,76%), yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dengan target pendapatan sebesar Rp 11.000.000.000,- dengan realisasi Rp 9.323.201.700,- (84,76%)

### b. Situasi Anggaran Tahun 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang mendukung dalam pencapaian kinerja. Gambaran situasi anggaran kesehatan dan sumber

pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT/UPK selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.14  
SITUASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN DAN UPT/UPK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2022

NO	JENIS ANGGARAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Dinas Kesehatan	239.422.505.677,-	179.580.551.120,-	75,01%
	a. APBN/Dekonsentrasi	18.391.596.000,-	14.347.712.172,-	78,01%
	b. APBD-P Provinsi	221.030.909.677,-	165.232.838.948,-	74,76%
2.	RSKD Dadi	193.928.862.602,-	157.712.417.987,18-	81,32%
3.	RS Sayang Rakyat	70.166.763.702,-	65.619.410.643,-	93,52%
4.	RSKDIA Pertiwi	12.560.120.483,-	12.398.858.451,-	94,94%
5.	RSKDIA Siti Fatimah	31.461.737.413,-	29.809.820.302,-	94,75%
6.	RSK Gigi dan Mulut	14.678.357.782,-	5.732.264.003,-	39,05%
7.	UPT Pelatihan Kesehatan	1.816.551.958,-	1.779.398.240,-	97,95%
8.	Unit Transfusi Darah	9.775.751.582,-	9.554.602.816,-	97,74%
<b>TOTAL</b>		<b>573.810.651.199,-</b>	<b>304.474.905.575,-</b>	<b>53,06%</b>



## c. Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2022

### 1. Dinas Kesehatan

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 221.030.909.677,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 165.232.838.948,- (74,76%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

#### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 112.872.539.872.- dengan realisasi sebesar Rp. 101.965.938.137,- (90,34%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 64.245.748.951,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 63.756.574.926,- (99,24%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 46.626.790.921,- dengan realisasi keuangan Rp 36.709.363.211,- (78,73%).
- Belanja Hibah ke Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (75%).

#### 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 108.158.369.805,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 63.266.799.926,- (58,49%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 61.191.954.203,- dengan realisasi Rp. 19.181.661.112,- (31,35%).
- Belanja Modal Gedung dan bangunan sebesar Rp. 46.626.051.602,- dengan realisasi Rp 44.005.498.814 (94,38%).
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi Rp 0 (0%).
- Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 130.364.000,- dengan realisasi Rp 79.640.000 (61,09%).

## 2. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT RSKD Dadi Tahun anggaran sebesar Rp 193.928.862.602,- dengan realisasi Rp 137.712.417.987,18,- (81,32%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 141.861.206.561,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.402.131.031,18- (82,05%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 51.620.942.772,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 51.323.739.175,- (99,24%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 90.240.263.789,- dengan realisasi keuangan Rp 65.078.391.856,18,- (72,12%).

### 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 52.067.656.041,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 41.310.286.956,- (79,34%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 46.431.733.431,- dan realisasi keuangan Rp. 36.160.944.055,- (77,88%).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.499.250.000,- dan realisasi keuangan Rp 4.214.165.892,- (93,66%)
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 636.672.610,- dengan realisasi keuangan Rp 548.127.500,- (86,09%).
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 387.049.509,- (77,41%).

## 3. UPT Rumah Sakit Sayang Rakyat

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT RS Sayang Rakyat Tahun anggaran sebesar Rp 75.009.618.175,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 69.888.259.253,- (93,17%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 56.222.443.702,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.478.613.330,- (95,12%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 28.625.732.280,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 27.842.378.721,- (97,26%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 27.596.711.422,- dengan realisasi keuangan Rp 25.636.234.609,- (92,90%).

### 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 18.787.174.473,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 16.409.645.923,- (87,34%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 13.543.674.473,- dan realisasi keuangan Rp. 12.796.074.996,- (94,48%).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.243.500.000,- dan realisasi keuangan Rp 3.613.570.927,- (68,92%)

## 4. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT RSK Ibu dan anak Pertiwi Tahun anggaran sebesar Rp 36.405.044.543,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 34.470.792.146,- (94,69%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 35.236.932.543,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.411.725.405,- (94,82%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 21.745.199.589,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 21.342.824.421,- (98,15%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.491.732.954,- dengan realisasi keuangan Rp 12.068.900.984,- (89,45%).

## 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.168.112.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.059.066.741,- (90,66%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 532.112.000,- dan realisasi keuangan Rp. 529.086.746,- (99,43%).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 636.000.000,- dan realisasi keuangan Rp 529.979.995,- (83,33%)

## 5. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT RSKD Ibu dan anak Siti Fatimah Tahun anggaran sebesar Rp 31.461.737.413,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.809.820.302,- (142,68%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 29.461.737.413,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.919.341.622,- (98,16%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 16.077.240.295,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.786.059.418,- (98,19%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.384.497.118,- dengan realisasi keuangan Rp 13.133.282.204,- (98,12%).

### 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 890.478.680,- (44,52%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 890.478.680,- (44,52%).

## 6. UPT Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT RSK Gigi dan Mulut Tahun anggaran sebesar Rp 14.678.357.782,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.732.264.003,- (39,05%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

### 1) Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 9.178.357.782,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.780.330.693,- (52,08%), yang terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.178.357.782,- dengan realisasi keuangan Rp 4.780.330.693,- (52,08%).

### 2) Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 5.500.000.000,- terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 951.933.310,- (17,31%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.400.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 902.649.000,- (20,51%).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0 (0%).
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 16.784.310,- (5,59%).
- Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 32.500.000,- (16,25%).

## 7. UPT Pelatihan Kesehatan

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT Pelatihan Kesehatan Tahun anggaran sebesar Rp 1.816.631.958,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.779.398.240,- (97,95%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

**1) Belanja Operasi**

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 1.794.711.958.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.757.478.240,- (97,93%), yang terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.794.711.958.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.757.478.240,- (97,93%).

**2) Belanja Modal**

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 21.920.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.920.000,- (100%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 21.920.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.920.000,- (100%).

**8. UPT Unit Transfusi Darah (UTD)**

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) UPT Unit Transfusi Darah Tahun anggaran sebesar Rp 9.775.751.582,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.554.602.816,- (97,74%).

*Belanja Daerah terdiri dari :*

**1) Belanja Operasi**

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 7.341.050.782.- dengan realisasi sebesar Rp. 7.120.241.516,- (96,99%), yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 2.400.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.399.529.456,- (99,98%).
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.941.050.782,- dengan realisasi keuangan Rp 4.720.712.060,- (95,54%).

**2) Belanja Modal**

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.434.700.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.434.361.300,- (99,99%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.236.200.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.236.136.300,- (100%).

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 198.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp 198.225.000 (99,86%).

#### d. Realisasi Anggaran APBN/Dekonsentrasi

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh Anggaran APBN/Dekonsentrasi dengan total alokasi anggaran di Tahun 2022 sebesar Rp 18.391.596.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.347.712.172,- (78,01%) dan realisasi fisik 93,01%, yang didukung oleh 6 Program, sebagai berikut :

##### 1) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.449.185.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.067.224.802,- (68,94%) dan realisasi fisik 81,20%.

##### 2) Program Pelayanan Kesehatan Perorangan

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.595.702.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.329.645.960,- (83,33%) dan realisasi fisik 90%.

##### 3) Program Pelayanan Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan

Alokasi anggaran sebesar Rp 221.599.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 188.900.000,- (85,24%) dan realisasi fisik 100%.

##### 4) Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

Alokasi anggaran sebesar Rp 6.656.929.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.403.428.500,- (81,17%) dan realisasi fisik 90,63%.

##### 5) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp 3.888.552.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.094.726.510,- (79,59%) dan realisasi fisik 96,25%.

##### 6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan/PPSDMK)

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.579.629.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.263.786.400,- (80,01%) dan realisasi fisik 100%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui Peningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan (SDMK), Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penyediaan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya di atas, maka kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kriteria penilaian kinerja **Tinggi (T)**. Hasil evaluasi sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 79,68% dan rata-rata pencapaian indikator sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 84,17% yang diukur melalui dua sasaran dan 5 indikator kinerja, dimana 2 indikator memenuhi kriteria *Sangat Tinggi*, 2 indikator memenuhi kriteria *Tinggi* dan 1 indikator memenuhi kriteria *Rendah*. Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel IV.1  
SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

NO	INDIKATOR	NILAI CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai SAKIP OPD	102,50%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Persentase Temuan Material	>100%	Sangat Tinggi (ST)
3.	Angka Kematian Ibu	76,47%	Tinggi (T)
4.	Angka Kematian Bayi	62,50%	Rendah (R)
5.	Prevalensi Balita Stunting	79,38%	Tinggi (T)
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>84,17%</b>	<b>Tinggi (T)</b>



## B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Permasalahan kesehatan dirasakan masih menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja, sedangkan seharusnya menjadi perhatian bersama sehingga menjadi lebih efektif dalam menindaklanjuti masalah tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja yang dijabarkan di bab sebelumnya beberapa langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan antara lain :

1. Integritas dan penegasan komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP/RB sehingga pencapaian kinerja lebih optimal.
2. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengambilan kebijakan dalam peningkatan capaian kinerja.
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini kami jabarkan sebagai pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik dan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih maksimal.

Makassar, 6 Februari 2022



**Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Selatan**

**dr. H. ROSMINI PANDIN, MARS**

Panghat/Gat. Pembina Utama Muda/IV C  
NIP. 19690909 200112 2 001

*Lampiran 1 : Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PK Tahun 2022*

**PENGUKURAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA (PK)**

**OPD : DINAS KESEHATAN**

**Tahun Anggaran : 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET	% CAPAIAN	KRITERIA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	80	82	102,50	Sangat Tinggi (ST)	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh Bawasda, untuk nilai Tahun 2022 diperoleh setelah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Inspektorat (belum ada)
		2	Persentase Temuan Material	Persen (%)	1	0,001	>100%	Sangat Tinggi (ST)	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/KH)	91	119	76,47	Tinggi (T)	
		2	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	5	8	62,50	Rendah (R)	
		3	Prevalensi Balita Stunting	Persen	21,59	27,2	79,38	Tinggi (T)	
<b>RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU</b>						<b>84,17%</b>	<b>Tinggi (T)</b>		

## Lampiran 2 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARMAN BAUSAT, Sp.B., Sp.OT (K) Spine

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi setiap triwulan dan jika dalam 2 (dua) triwulan tidak mencapai target, maka Pihak Pertama bersedia dievaluasi.

Makassar, 16 Maret 2022

Pihak Kedua,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Pihak Pertama,

dr. ARMAN BAUSAT, Sp.B., Sp.OT (K) Spine

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP OPD	80%
		- % Temuan Material	1%
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu	91/100.000 Kelahiran Hidup
		- Angka Kematian Bayi	5/1.000 Kelahiran Hidup
		- Prevalensi Balita Stunting	21,59%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	214.339.501.253,-	4 Kegiatan
2	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	2.704.312.900,-	2 Kegiatan
3	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	546.743.600,-	1 Kegiatan
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.182.900.000,-	2 Kegiatan
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	74.784.504.166,-	8 Kegiatan
	JUMLAH	293.557.961.919,-	17 Kegiatan

Makassar, 16 Maret 2022

Pihak Kedua,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Pihak Pertama,

dr. ARMAN BAUSAT, Sp.B., Sp.OT (K) Spine



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

**DINAS KESEHATAN**

*Jl. Pahliris Kemerdekaan Km. 11 Telp : (0411) 586451, Fax : (0411) 586393*

**Makassar 90245**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 440.1.2/11482/Diskes**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urutan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Pedoman Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**Dr. H. M. IHSAN MUSTARI, M.I.P.M.**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19660217 199803 1 004

Terdistribusi :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Peringat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 440.1.2 / 11482 / Diskes

TANGGAL : 27 Oktober 2020

---

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	Penanggungjawab
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulsel; BPS (Badan Pusat Statistik)	Semua Bidang terkait
	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama di kali 100.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)	Bidang Kesmas
	Angka Kematian Bayi	/ 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (usia 0 - 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama di kali 1.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)	Bidang Kesmas
	Prevalensi Balita Stunting	Persentase (%)	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulsel; Riskesdas; PSG	Bidang Kesmas

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

dr. H. M. ICHSAN MUSTARI, M.H.M.  
Pangkat : Pembina Utama Muda